

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal, usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara republik Indonesia.

Pembangunan di desa merupakan pembangunan awal untuk mensukseskan pembangunan di daerah, sehingga membutuhkan perencanaan dan pendanaan yang matang. Penyelenggara pembangunan infrastruktur dan suprastruktur di pedesaan adalah pemerintah desa sendiri, dimana pemerintah desa membuat RPJMDes (rencana pembangunan jangka menengah desa). Pembangunan yang dilakukan oleh desa tentunya tidak lepas dari penggunaan keuangan desa

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Besar dana desa yang diterima dapat mengatasi permasalahan desa dan mampu menunjang fasilitas umu dan pengembangan desa menjadi lebih baik. Melihat banyaknya permasalahan sehingga setiap tahunnya seluruh desa di Indonesia mendapatkan dana desa salah satunya desa Rambah Tengah Hulu.

Desa Rambah Tengah Hulu merupakan salah satu desa yang berada dikecamatan Rambah, yang kecamatan Rambah terdiri dari 14 desa. Desa Rambah Tengah Hulu memiliki luas wilayah 6165,66 ha dan jumlah penduduk 2.828 jiwa, terdiri dari 850 KK. Nama desa Rambah Tengah Hulu diambil dari nama daerah asalnya semula daerah yang terletak di hulu desa Rambah Tengah kemudian

terdapat tempat wisata (rekreasi) dengan berjalan kaki yang saat itu masih mempergunakan jalan setapak.

Dana desa yang diterima oleh pemerintah desa Rambah Tengah Hulu pada tahun 2017 sebesar Rp. 825.175.000. Dana desa tersebut tidak langsung diterima 100% oleh pemerintah desa Rambah Tengah Hulu, melainkan secara bertahap. Tahap pertama sebesar 60% yaitu Rp. 495.105.000, tahap kedua sebesar 40% yaitu Rp 330.070.000, dan pada tahun 2018 dana mengalami kenaikan sebesar Rp. 962.331.000 melewati tiga tahap yaitu tahap pertama sebesar 20 % yaitu 192.466.200, tahap kedua sebesar 40% yaitu 384.932.400 dan tahap ketiga sebesar 40% yaitu 384.932.400. dari penggunaan dana desa terjadi silpa pada kegiatan pembangunan infrastruktur.

Silpa adalah kegiatan pembangunan yang tidak terlaksanakan karena tidak tepat waktu, ditahun 2017 terjadi silpa pada kegiatan fisik Infrastruktur sebesar 10 persen dari dana desa yaitu sebesar Rp.54,820,000 dan ditahun 2018 silpa terjadi sebesar 13 persen dari dana desa yaitu Rp. 84,101,700. Dampak silpa sangat berpengaruh besar terhadap desa yaitu berkurangnya pagu dana desa, indikatif untuk tahun selanjutnya tentukan sangat merugikan bagi desa.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kegiatan Fisik Infrastruktur Disebabkan Faktor Silpa Di Desa Rambah Tengah Hulu kecamatan Rambah“.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam peneltian ini adalah persepsi dari aparat desa terhadap faktor utama penyebab terjadinya kegiatan pembangunan yang tidak terlaksana (silpa) pada kegiatan fisik infrastruktur desa Rambah Tengah Hulu kecamatan Rambah tahun 2018.

## **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui persepsi dari aparat desa tentang faktor utama penyebab terjadinya kegiatan pembangunan yang tidak terlaksana (silpa) pada kegiatan fisik infrastruktur desa Rambah Tengah Hulu kecamatan Rambah tahun 2018.

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Penelitian ini dapat memberikan manfaat berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan serta pertanggung jawaban dalam pembangunan infrastruktur desa Rambah Tengah Hulu.
2. Diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan pertimbangan dalam memahami evaluasi kegiatan fisik infrastruktur.
3. Dapat memberikan wawasan pengetahuan untuk masyarakat desa Rambah Tengah Hulu mengenai evaluasi kegiatan fisik infrastruktur tahun 2018 sehingga ditahun selanjutnya masyarakat dapat berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa.
4. Diharapkan sebagai pedoman bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian tentang evaluasi kegiatan fisik infrastruktur disebabkan faktor silpa yang akan datang, sehingga informasi yang bisa diterapkan dan menjadi perubahan ke arah yang lebih baik.

#### **1.4 Batasan Penelitian**

Batasan-batasan yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Objek penelitian berlokasi di desa Rambah Tengah Hulu.
2. Penelitian ini hanya berfokus membahas evaluasi kegiatan fisik infrastruktur disebabkan faktor silpa.
3. Responden adalah aparat desa (kepala desa, sekretaris desa, staf kantor desa), tim pelaksana kegiatan (TPK), dan badan permusyawaratan desa (BPD).
4. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini penulis akan mencantumkan lima buah penelitian terdahulu yang relevan atau berhubungan dengan judul yang ingin diteliti mengenai “Evaluasi Kegiatan Fisik Infrastruktur Disebabkan Faktor Silpa di desa Rambah Tengah Hulu kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu)“ sebagai berikut:

1. Suluh Milanti (2015) dari penelitian yang terdahulu yang berjudul evaluasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur studi kasus di desa Gilangharjo, kecamatan Pandak, kabupaten Bantul menyimpulkan bahwa hasil penelitian pembangunan infrastruktur desa Gilangharjo melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang ada di desa sebagai perencana, pelaksana dan penerima hasil dari sebuah pembangunan. Partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat menentukan keberlangsungan dan kualitas sebuah pembangunan infrastruktur yang ditujukan melalui pembangunan secara terpadu, yaitu secara gotong-royong, dimana masyarakat membaaur menjadi satu untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur.
2. Gunawan Arif Wibowo (2017) dari penelitian yang terdahulu yang berjudul evaluasi pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan sarana prasarana desa (desa Wonoasri kecamatan Grogol kabupaten Kediri) menyimpulkan bahwa hasil penelitian yaitu pengalokasian alokasi dana desa untuk desa Wonoasri menjadi dua bagian yaitu 30% untuk kegiatan pemerintah dan BPD 70% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, pihak yang terlibat dalam penegelolaan alokasi dana desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, ketua LPMD. Dalam pembangunan sarana prasarana desa di desa Wonoasri adanya kesalahan dalam memposkan anggaran, adanya usulan yang tidak di akomodir, perencanaan pengalokasian alokasi dana desa tidak mempertimbangkan periode masa jabatan kepala desa serta perencanaan yang kurang matang. Faktor pendukung pengelolaan alokasi dana desa meliputi: adanya peraturan perundang-undangan, adanya pengawas dalam pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan faktor penghambat dari

pengelolaan alokasi dana desa meliputi keterbatasan dana alokasi desa yang dialokasikan untuk pembangunan sarana prasarana desa, tidak digunakannya RJMDesa dan hasil musrenbang dalam menetapkan pembangunan sarana dan prasarana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta masih adanya budaya paternalistik.

3. Munirah (2017) dari penelitian yang terdahulu yang berjudul evaluasi pengelolaan dana desa di desa Lubuk kecamatan Kundur kabupaten Karimun tahun 2017 menyimpulkan bahwa hasil penelitian yaitu pengelolaan dana desa memiliki dampak terhadap masyarakat, baik dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang diharapkan yaitu dengan adanya drainase dan tembok penahan tanah bisa mengurangi kerusakan jalan, tetapi adanya pembangunan polindes masih belum menghasilkan dampak yang diharapkan. Untuk pemberdayaan desa dampak yang dihasilkan masih belum dirasakan oleh masyarakat secara luas, karena pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Muhammad Amin Cakrawijaya, Bambang Riyanto dan Nuroji (2014). evaluasi program pembangunan infrastruktur perdesaan di desa Wonokerto, kecamatan Turi, kabupaten Sleman menyimpulkan bahwa keterkaitan dan dampak PPIP yang telah dipilih masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan perdesaan dengan menggunakan pendekatan *triangulasi* atau *mix-method* dan teknik sampling multi-stage sampling, dan infrastruktur yang dibangun melalui PPIP secara umum hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat, dan bersifat sementara atau tidak berkelanjutan.
5. Nurliana (2014) dari penelitian yang terdahulu yang berjudul pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan fisik di desa Sukomulyo kecamatan Sepaku kabupaten Penajam Paser Utara menyimpulkan bahwa hasil penelitian yaitu pada proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ADD dalam pembangunan fisik di desa Sukomulyo kecamatan Sepaku kabupaten Penajam Paser Utara pemerintah desa telah melibatkan masyarakat desa dalam penyusunan rencana kegiatan dan penentuan kebijakan penggunaan alokasi dana desa (ADD) dan keterbatasan kemampuan sumber

daya manusia (SDM) aparatur pemerintah desa sehingga pemahaman perencanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dan pelaksanaan pembangunan fisik yaitu para teknisi pembangunan masih kurang membuat pembangunan fisik belum tepat sasaran.

## **2.2 Keaslian Penelitian**

Penelitian ini meninjau tentang evaluasi kegiatan fisik infrastruktur disebabkan faktor silpa di desa Rambah Tengah Hulu kecamatan Rambah yang mana belum pernah dilakukan penelitian tentang ini sebelumnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada :

1. Penelitian dilakukan di desa Rambah Tengah Hulu kecamatan Rambah.
2. Responden berupa aparat desa Rambah Tengah Hulu yaitu (kepala desa, sekretaris desa, Staf kantor desa), tim pelaksana kegiatan (TPK) dan Badan Permusyawarahan desa (BPD).
3. Indikator yang digunakan dalam pengumpulan data kuesioner yang berfokus pada kegiatan fisik infrastruktur disebabkan faktor silpa.

## **BAB III**

### **LANDASAN TEORI**

#### **3.1 Pengertian Evaluasi**

Evaluasi merupakan saduran dari bahasa Inggris “*evaluation*” yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Evaluasi lebih bersifat melihat ke depan dari pada melihat kesalahan kesalahan dimasa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan di masa mendatang atas suatu program.

Evaluasi sangat berguna dan memiliki banyak manfaat karena kita bisa mengetahui tingkatan sesuatu sebagai penilaian terhadap apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Misalnya dalam perkantoran, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan perkantoran. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya.

Pengertian evaluasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditujukan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya.

Menurut Purwanto (2002) secara garis besar bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan.

#### **3.2 Tujuan Evaluasi**

Evaluasi bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan, untuk mengetahui kesenjangan antara perencanaan dan target. Dengan mengetahui kebutuhan ini pelaksanaan program dapat membuat penyesuaian dengan memanfaatkan umpan balik tersebut. Kesenjangan yang menjadi kebutuhan itu bisa jadi mencakup faktor biaya, waktu, personel, alat, dan sebagainya.

Sementara itu, evaluasi bertujuan memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentang komponen input pada program, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan dan keputusan tentang *output* menyangkut hasil dan dampak dari program kegiatan, dan terutama apa yang dapat diperbaiki pada program yang sama yang akan dilaksanakan di waktu dan tempat lain.

### **3.3 Pengertian Dana Desa**

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyatakan bahwa dana desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang disebut dengan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk pengelolaan keuangan desa tersebut meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.

### **3.4 Pengertian Desa**

Desa adalah bagian yang penting dari suatu masyarakat yang mana tak dapat terpisahkan. Pentingnya desa ini disampaikan oleh berbagai ahli yang memberikan pendapatnya. Oleh karena itulah, keberadaan desa semestinya tidak boleh diremehkan termasuk juga oleh pemerintah karena pentingnya keberadaan desa tersebut. Berikut beberapa definisi desa menurut berbagai ahli. :

1. R.Bintarto (1977). Desa adalah merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

2. Sutarjo Kartohadikusumo (1965). Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.
3. William Ogburn dan MF Nimkoff. Desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas.
4. S.D. Misra. Desa adalah suatu kumpulan tempat tinggal dan kumpulan daerah pertanian dengan batas-batas tertentu yang luasnya antara 50 – 1.000 are.
5. Paul H Landis. Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan cirri-ciri sebagai berikut mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuaan terhadap kebiasaan. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **3.5 Pengertian Pembangunan Infrastruktur**

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”

Sedangkan infrastruktur berarti prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha dan pembangunan. Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan

perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

### **3.6 Ruang Lingkup Pembangunan Infrastruktur**

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

Agar lebih jelas ruang lingkup pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, jembatan, tambatan perahu.
2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi perdesaan.
3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.

### **3.7 Indikator Evaluasi Kegiatan Fisik Infrastruktur Disebabkan Faktor Silpa Di Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah**

#### **3.7.1 Waktu Pelaksanaan**

Andi Et Al (2003) secara umum faktor-faktor yang potensial untuk mempengaruhi waktu pelaksanaan konstruksi terdiri dari tujuh kategori, yaitu tenaga kerja, bahan (material), peralatan (*equipment*), karakteristik tempat (*site characteristics*), manajerial (*managerial*), keuangan (*financial*), faktor-faktor lainnya antara lain intensitas curah hujan, kondisi ekonomi, dan kecelakaan kerja. Menurut Proboyo (1999) indikator kegiatan yang mempengaruhi waktu pelaksanaan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Identifikasi aktivitas

Identifikasi aktivitas bertujuan untuk mengetahui secara rinci kegiatan-kegiatan yang ada dalam pelaksanaan proyek. Pengidentifikasi aktivitas yang baik dan lengkap di peroleh dari peninjauan, pemahaman dan analisa yang cermat atas semua dokumen kontrak proyek yang ada, karena itu dokumen kontrak harus benar-benar lengkap menginformasikan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan.

#### 2. Penyusunan rencana kerja proyek

Penyusunan rencana kerja proyek di maksud kan untuk menentukan tahapan/urutan aktivitas kerja dalam melaksanakan proyek. Urutan aktivitas ini diperlukan untuk menggambarkan hubungan antar berbagai aktivitas yang ada dalam proses pelaksanaan proyek.

#### 3. Penjadwalan aktivitas-aktivitas

Penjadwalan aktivitas-aktivitas proyek pada dasarnya adalah menentukan pada saat kapan suatu aktivitas harus mulai dan berakhir. Rangkaian aktivitas-aktivitas dengan durasinya masing-masing, yang telah diurutkan akan membentuk rangkaian penjadwalan aktivitas, yang menjadi jadwal pelaksanaan proyek. Pembentukan jadwal proyek ini pada prinsipnya perlu memenuhi total waktu yang di sediakan untuk menyelesaikan proyek tersebut, kegiatan-kegiatan yang akan ada dalam pelaksanaan proyek.

#### 4. Penetapan jadwal Kegiatan Kembali

Peninjauan kembali jadwal bertujuan menjamin bahwa jadwal proyek adalah sesuai dan lengkap, sedangkan analisa jadwal bermaksud menjamin bahwa jadwal tersebut merupakan rencana yang dapat dikerjakan dengan telah mempertimbangkan sumber daya produksi manajerial yang ada. Penerapan jadwal tahap akhir proses perencanaan dan penjadwalan proyek, dimana jadwal telah cukup lengkap dan akurat untuk melaksanakan dan menotoring pelaksanaan proyek.

#### 5. Durasi aktivitas

Durasi suatu aktivitas adalah panjangnya waktu pekerjaan mulai dari *start* sampai *finish*. Ada dua pendekatan tentang menentukan durasi aktivitas, yaitu:

- a. Pendekatan teknik, meliputi :
  1. Memeriksa persediaan sumber daya.
  2. Mencatat produktifitas sumber daya.
  3. Menentukan durasi.
- b. Pendekatan praktek, meliputi :
  1. Pendekatan dari pengalaman yang terdahulu sebagai acuan untuk penyusunan *estimate* durasi aktivitas.
  2. Pendekatan dari keputusan yang telah diambil.

### **3.7.2 Pelaksanaan Terlambat**

Evrianto (1998) keterlambatan adalah sebagai waktu pelaksanaan yang tidak dimanfaatkan sesuai rencana kegiatan sehingga menyebabkan satu atau beberapa kegiatan mengikuti menjadi bertunda atau tidak di selesaikan tepat sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Madjid ( 2006) mengemukakan ketika proyek kontruksi terlambat. Artinya pelaksanaan proyek tidak dapat dilaksanakan sesuai kontrak maka akan ada penambahan waktu. Apabila setelah penambahan waktu pelaksanaan proyek ini juga tidak selesai sesuai kontrak yang sudah di sepakati. Maka akan diberikan waktu tambahan oleh pihak pemilik (*owner*) kepada pihak pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut. Dengan kata lain bahwa adanya waktu tambahan yang diberikan oleh pihak pemilik (*owner*) kepada pihak pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan proyek, tetapi tidak juga terlaksana. Maka kemungkinan akan terjadi pemutusan kontrak kerja, dapat dikategorikan sebagai tidak tepatnya waktu pelaksanaan proyek yang telah ditetapkan.

Widhiawati (2009) pembuatan rencana jadwal proyek konstruksi selalu mengacu pada perkiraan yang ada pada saat rencana pembangunan tersebut dibuat, masalah dapat timbul apabila ada ketidaksesuaian antara jadwal rencana yang telah dibuat dengan pelaksanaannya. Sehingga dampak yang sering terjadi adalah keterlambatan waktu pelaksanaan penyelesaian proyek dan juga di sertai dengan meningkatnya biaya pelaksanaan proyek tersebut.

Menurut Alfien Et Al (200) keterlambatan proyek diasumsikan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan proyek dari yang dijadwalkan oleh kontraktor sesuai kontrak. Keterlambatan proyek ini berdampak pada progress proyek dan

tertundanya aktifitas pelaksanaan proyek. Keterlambatan pelaksanaan proyek ini termasuk adanya faktor penyebab oleh faktor cuaca, sumber daya dan perencanaan.

Alaghbari (2009) *concurrent delay* adalah keterlambatan pelaksanaan proyek lebih kompleks tapi juga lebih spesifik jenis keterlambatan proyek. Adanya keterlambatan proyek disebabkan lebih satu faktor atau kombinasi dari dua atau lebih penyebab keterlambatan proyek yang terjadi selama pada waktu bersamaan pelaksanaan proyek atau dapat terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) periode waktu pelaksanaan proyek. Dari lima pendapat maka indikator pelaksanaan terlambat yaitu

1. Pelaksanaan diluar waktu kontrak.
2. Tidak sesuainya kontrak perencanaan kontrak.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan proyek.
4. Pelaksanaan kegiatan proyek dalam waktu bersamaan.

### **3.7.3 Cuaca**

Soeharto (1999) menjelaskan kegiatan proyek dapat diartikan sebagai satu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas. Dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk atau *deliverable* yang kriteria mutunya telah digariskan dengan jelas. Menurut Widmen (1992) resiko proyek dalam manajemen resiko adalah efek kumulasi dari peluang kejadian yang tidak pasti, yang mempengaruhi sasaran dan tujuan proyek. Sedangkan manajemen resiko adalah proses yang meliputi perencanaan manajemen resiko, identifikasi resiko, perencanaan respon resiko dan pemantauan kontrol proyek.

Nguyen (2010) kondisi cuaca (hujan) dapat ditetapkan sebagai keterlambatan yang dapat dimafaafkan, apabila sesuai persyaratan kontrak, tidak dapat diramalkan/diketahui sebelumnya dan memperngaruhi lintasan kritis.

### **3.7.4 Kelengkapan dokumen**

Ervianto (2005) kelengkapan dokumen terbagi tiga jenis yaitu dokumen desain, dokumen lelang dan dokumen kontrak. Sedangkan menurut keputusan presiden (Kepres) nomor 80 tahun 2003 dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia/pejabat pengadaan sebagai pedoman dalam proses

permintaan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia/pejabat pengadaan.

Indikator kelengkapan dokumen sebagai berikut :

1. Proses pembuatan gambar.
2. Proses permintaan dan persetujuan gambar kerja.
3. Ketidaksepehaman aturan pembuatan kerja.
4. Ada pekerjaan tambahan.
5. Permintaan perubahan atas pekerjaan yang telah diselesaikan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) 2016, dokumen rencana teknis adalah gambar teknis bangunan gedung, dan kelengkapan yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri dari rencana arsitek, rencana struktur, rencana utilitas, serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.

### **3.7.5 *Detailn Engineering Design (DED)***

Assiyanto (2005) berdasarkan kontrak konstruksi dan dokumen gambar dan spesifikasi teknis yang harus ada, maka harus disusun suatu perencanaan pelaksanaan agar sasaran yang ingin dicapai dapat direalisasi. Keberhasilan kegiatan pembangunan konstruksi sangat ditentukan oleh perencanaan konstruksi baik dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan konstruksi. Adapun keluaran dan produk penyusunan DED adalah:

1. Gambar rencana teknis (gambar rancangan, detail rancangan dan gambar konstruksi)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 45 tahun 2007 gambar detail bangunan atau bestek bisa terdiri dari gambar rencana teknis, gambar rencana teknis meliputi arsitektur, struktur, mekanikal, selektrikal, tata lingkungan semakin baik dan lengkap gambar akan mempermudah proses pekerjaan dan mempercepat dalam penyelesaian pekerjaan konstruksi.

Gambar *Shop Drawing* merupakan gambar perencanaan yang dijadikan acuan untuk melaksanakan pekerjaan, dibuat setelah melakukan peninjauan lapangan yang disetujui oleh pimpinan pekerjaan.

## 2. Rencana kerja dan syarat-syarat teknis (spesifikasi teknis)

Rencana kerja dan syarat-syarat teknis mencakup persyaratan mutu dan kuantitas material bangunan, dimensi material bangunan, prosedur pemasangan material dan persyaratan-persyaratan lain yang wajib dipenuhi oleh pekerjaan konstruksi, RKS menjadi syarat yang harus dipenuhi supaya dimasukkan kedalam standar dokumen pengadaan (SDP).

## 3. Estimate Engineer (EE) atau rencana anggaran biaya (RAB)

Rencana anggaran biaya (RAB) adalah perhitungan keseluruhan harga dari volume masing-masing satuan pekerjaan. RAB dibuat berdasarkan gambar, volume pekerjaan (*Bill Of Quantity*) serta spesifikasi dan harga. Susunannya akan direview, perhitungan akan dikoreksi dan diupdate harga sesuai dengan harga pasar supaya dapat menjadi harga perkiraan sendiri.

### 3.7.6 Monitoring

Setelah proyek berjalan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan proyek, maka perlu dilakukan pengukuran pada pekerjaan yang dituangkan dalam suatu laporan. Laporan kemajuan proyek menjelaskan kemajuan proyek sampai dengan saat pelaporan. Menurut Soeharto, Clough dan Sears (2009) beberapa langkah yang dilakukan dalam monitoring yaitu

#### 1. Mengukur dan mencatat hasil kerja

Dalam pengukuran dan pencatatan hasil kerja harus diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. Memperoleh informasi *actual start* dan *actual completion date*.
- b. Memperoleh informasi kemajuan dari setiap aktivitas.
- c. Memperoleh hasil perubahan hubungan atau urutan dari suatu aktivitas.
- d. Memperoleh informasi laporan singkat tentang kejadian penting pada saat pengerjaan proyek.

#### 2. Mencatat pemakaian sumber daya.

#### 3. Memeriksa kualitas.

#### 4. Mencatat kinerja dan produktivitas.

### 3.8 Indeks Kepentingan

Skala likert adalah suatu dimensi skala dimana responden memilih satu pilihan yang paling sejalan dengan pandangan mereka. Sebuah opsi pilihan dalam

skala likert dalam bentuk pernyataan yang diajukan kepada responden untuk mengevaluasi sesuai untuk setiap jenis kriteria subjektif dan objektif. Umumnya skala likert untuk mengukur persetujuan atau ketidak setujuan. Format skala likert dibuat dalam bentuk sebuah pertanyaan, yang mana seseorang dapat setuju atau tidak setuju dengan derajat yang bervariasi. Penilaian diwakili dengan angka-angka dengan nilai antara 1 sampai 5 atau lebih (Sugiyono, 2012).

Untuk menentukan klasifikasi *ranking* atau peringkat dari evaluasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di desa Rambah Tengah Hulu terhadap jawaban responden dianalisis dengan rumus indeks kepentingan berdasarkan nilai rata-rata persepsi responden dengan menggunakan persamaan rumus:

$$I = \sum_{i=1}^5 \frac{a_i \cdot X_i}{N} \dots\dots\dots (3.1)$$

dimana:

- N = Jumlah responden (kuesioner)
- X<sub>i</sub> = Frekuensi respon dari setiap persepsi
- X<sub>1</sub> = Frekuensi jawaban sangat berpengaruh
- X<sub>2</sub> = Frekuensi jawaban berpengaruh
- X<sub>3</sub> = Frekuensi jawaban sedang
- X<sub>4</sub> = Frekuensi jawaban kurang berpengaruh
- X<sub>5</sub> = Frekuensi jawaban tidak berpengaruh
- a<sub>i</sub> = nilai atas persepsi yang diberikan (1,2,3,4,5).

Menurut Riduan (2003) skala likert digunakan untuk mengukur silpa, pendapat atau tentang kejadian atau gejala sosial. Setiap jawaban yang diberikan akan dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata. Adapun interval kelas dan katagori dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 interval kelas dan Katagori

Katagori	Interval	Rentang Skor
Sangat Berpengaruh	81 % - 100 %	4.05 – 5.00
Berpengaruh	61 % - 80 %	3.05 – 4.04
Sedang	41 % - 60 %	2.05 – 3.04

Kurang Berpengaruh	21 % - 40 %	1.05 – 2.04
Tidak Berpengaruh	0 % - 20 %	0.00 – 1.04

Sumber : Riduan (2008)

### 3.9 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2005) Uji Validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (*Contet*) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian.

Ketepatan pengujian suatu hipotesis tentang hubungan variabel penelitian sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian yang sudah dikumpulkan tidak akan berguna bila mana alat pengukur yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tersebut tidak memiliki validitas yang tinggi. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin di ukur. Dengan kata lain bahwa hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Reliabilitas selain berarti ketelitian dalam melakukan pengukuran juga dapat diartikan sebagai ketelitian alat ukur yang digunakan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut *reliabel*. Dengan kata lain, reabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam gejala yang sama. Adapun teknik perhitungan indeks reliabilitas yang digunakan adalah suatu teknik pengukuran ulang, dengan meminta responden yang sama untuk menjawab kembali semua pertanyaan dalam alat pengukur sebanyak dua kali dengan selang waktu 7 hari. Perhitungan yang digunakan sama dengan perhitungan validitas.

### 3.10 Korelasi Produk Momen

Korelasi produk momen merupakan metode statistik yang digunakan dalam mengukur tingkat validitas dan reliabilitas data, yang telah disusun menurut peringkat (*ranked data*), dinyatakan dalam lambang r. Cara menghitung korelasi produk momen untuk menguji validitas kuesioner meliputi :

1. Susun daftar pertanyaan dengan skala nilai antara 1 - 5.
2. Gunakan rumus produk momen untuk uji validitas untuk tiap nomor pertanyaan yang ada pada daftar pertanyaan.

3. Bandingkan skor nilai Rhitung yang dicapai dengan nilai Rtabel pada baris ke df pada taraf signifikan tertentu, 5 % atau 1 %.
4. Bila Rhitung lebih besar dari Rtabel berarti pertanyaan yang diuji valid, sebaliknya bila Rhitung lebih kecil dari Rtabel berarti pertanyaan yang diuji tidak valid.

Uji validitas dan reliabilitas data dengan menggunakan rumus:

$$r = \frac{N(\sum XY) - (\sum X \times \sum Y)}{\sqrt{(N\sum X^2 - (\sum X)^2) \times (N\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}} \dots\dots\dots (3.2)$$

keterangan:

N = jumlah kuesioner

X = skor pertanyaan (1,2,3,4,5,6)

Y = skor total

XY= skor pertanyaan dikalikan skor total

r = korelasi produk momen.

Penilaian hasil uji reliabilitas dengan melihat angka reliabilitas yang dihasilkan dengan melihat nilai interpretasi sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 3.2 Interpretasi nilai koefisien korelasi r

Besar nilai r	Interpretasi
0	Tidak ada korelasi
0,01 – 0,20	Sangat rendah
0,21 – 0,40	Rendah
0,41 – 0,60	Agak rendah
0,61 – 0,80	Cukup
0,81 – 0,99	Tinggi
> 1	Sangat tinggi

Sumber: Usman, 2006